

PENGANTAR EDITOR

Ikma Citra Ranteallo

Hubungan antara masyarakat dan *elite* di banyak arena sosial menjadi salah satu kunci dalam arah transformasi negara bangsa, yaitu arah kemunduran atau kemajuan. Sosiologi melacak hubungan masyarakat dan elite melalui konsep-konsep kunci sosiologis, dalam berbagai mazhab berbeda, termasuk di antaranya yang menjadi fundamen adalah kepentingan, kekuasaan, stratifikasi, hingga nilai-norma (pengetahuan). Pada konteks masyarakat Indonesia yang saat ini memasuki tahun politik (2023-2024), sosiologi akan melihat bagaimana hubungan masyarakat dan *elite* akan mengalami eskalasi yang melibatkan hubungan kekuasaan, kepentingan, stratifikasi dan pengetahuan.

Highley (2008) mengajukan definisi ‘elite’ yaitu ‘Elites may be defined as persons who, by virtue of their strategic locations in large or otherwise pivotal organizations and movements, are able to affect political outcomes regularly and substantially’ (Elit dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang, berdasarkan lokasi strategisnya di dalam organisasi dan gerakan yang besar atau penting, dapat memengaruhi hasil-hasil politik secara teratur dan substansial). Elite terus-menerus mengklaim status dan barang berharga lainnya untuk diri mereka sendiri, kerabat, teman dan sekutu mereka yang tidak diterima oleh anggota lain sebagai sesuatu yang sah

Rezim demokratis yang stabil sangat bergantung pada persatuan dan konsensus antara elit nasional. Namun, seringkali para *elite* ini terpecah belah, sehingga rezim politik tidak stabil, dan menyebabkan transisi dan kerusakan demokrasi. Meskipun ada perkembangan sosial ekonomi dan perubahan lain dalam masyarakat, perpecahan antara elit tetap ada. Elit nasional yang terpecah belah cenderung menghasilkan rezim yang tidak stabil. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran elit nasional dalam memahami transisi demokrasi dan keruntuhan negara (Highley dan Burton, 1989).

Hubungan sosiologis masyarakat dan *elite* dalam ruang demokrasi dan digitalisasi ke-Indonesia-an di tahun politik perlu mendapatkan pengamatan, kajian dan advokasi. Hal ini tidak terlepas bagaimana sejarah hubungan tersebut diwarnai oleh dominasi dari *elite* terhadap masyarakat. Akibat dominasi *elite* adalah marjinalisasi masyarakat dalam merealisasikan keadilan sosial ekonomi, politik, dan HAM (Hak Asasi Manusia). Proses dominasi berlangsung melalui penempatan masyarakat hanya sebagai obyek yang dieksploitasi untuk tujuan-tujuan sektorsial elitis.

Masyarakat sipil mempraktikkan politik dalam dua cara yang berbeda. Pertama, masyarakat sipil terlibat dalam politik rutin artikulasi kepentingan - melobi pemegang kekuasaan, mengorganisir kampanye untuk mendukung kepentingan, mempengaruhi opini publik, penyusunan agenda, pemantauan negara, dan intervensi dalam politik legislatif dan yudikatif. Kedua, organisasi masyarakat sipil melakukan protes, demonstrasi, mengkoordinasikan acara-acara kontroversial, dan melakukan pembangkangan sipil untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini bertujuan memobilisasi dukungan, mempublikasikan isu-isu penting, dan memaksakan audiens pada aktor-aktor lain (Hellmeier dan Bernhard, 2023).

Konteks global wacana elit dapat diamati pada polarisasi sikap publik Eropa terkait anti-imigrasi. Ketika elit politik di suatu negara menjadi lebih positif terhadap isu-isu terkait imigrasi, masyarakat Eropa yang cenderung lebih terbuka juga. Di sisi lain, masyarakat menjadi lebih memusuhi orang asing pada saat para elit politik lebih tertutup. Kesenjangan sikap antara kelompok politik kiri dan kanan meningkat ketika para elit politik menjadi lebih

eksklusif. Beberapa model juga menunjukkan bahwa meningkatnya arus masuk imigrasi dan wacana inklusi dapat meningkatkan polarisasi (Schmidt-Catran dan Czymara, 2023).

Pada awal abad ke-20, ahli hukum dan sosiolog, Oliveira Vianna, serta sosiolog dan antropolog, Gilberto Freyre, menganalisis heterogenitas etnis Brasil dengan pendekatan biologi dan psikologi sosial. Freyre mengajukan gagasan “*ethnic democracy*”, sebagai bagian dari pembentukan demokrasi dan identitas kolektif Brasil. Penilaian relevansi politik dari konteks etnis dan bagaimana ide-ide tersebut mempengaruhi pemikiran politik. Menurut Vianna, properti pedesaan yang besar, tidak ada solidaritas politik di luar pedesaan. Dialektika perlindungan dan kepatuhan antara aristokrasi pedesaan dan keluarga-keluarga desa adalah satu-satunya ikatan yang menjaga kesatuan Brasil (Passos, 2023). Karl Mannheim menyatakan peran bukti-bukti ilmiah dalam beberapa hal serupa dengan argumen pembuatan kebijakan berbasis bukti yang telah berpengaruh sejak tahun 1990-an. Ilmu pengetahuan, termasuk ilmu sosial, harus memainkan peran kunci dalam proses ini jika masalah-masalah yang ada ingin didiagnosis secara akurat dan cara-cara yang efektif untuk mengimplementasikan kebijakan dapat ditemukan (Hammersley, 2023).

Secara khusus pada fase tahun politik 2023 dan secara umum dalam nation-state building, sosiologi memiliki kepentingan mentransformasi hubungan masyarakat dan *elite* berbasis pada prinsip inklusifitas, yaitu kesetaraan, menempatkan semua aktor sebagai subyek, berorientasi pada keadilan, dan kepentingan umum. Oleh karena itu Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) menyelenggarakan Konferensi Nasional Sosiologi (KNS) X dengan tema “Hubungan Masyarakat dan *Elite* Dalam Mewujudkan Indonesia Maju”, di Universitas Muhammadiyah, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Konferensi yang dilaksanakan tanggal 7-9 Juni 2023 tersebut bertujuan mendiskusikan dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi praktik terbaik di lapangan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut berdasarkan beragam kajian ilmiah dengan pendekatan teori-teori Sosiologi, dan metode-metode penelitian yang didokumentasikan melalui Prosiding KNS X APSSI.

Bab I: Identitas, Masyarakat dan Elite dalam Pemilu Indonesia

Ruang politik digital yang tidak memiliki batasan ruang dan waktu menjadi bagian penting bagi para politisi untuk melakukan komunikasi kepada publik. Ruang-ruang politik digital mulai berkembang di berbagai jenis media sosial, salah satunya seperti Twitter. Para politisi berlomba-lomba membangun citra identitas – reputasi sebagai politisi – yang menunjukkan kemampuannya untuk dapat menjadi pemimpin dan mampu menjalankan amanahnya. Tidak jarang juga masyarakat yang menyaksikan bagaimana para politisi berkontestasi di ruang digital turut serta memberikan penilaian, tanggapan, kritik, dan berbagai statement yang ditujukan kepada para politisi diuraikan oleh Ichmi Yani Arinda Rohmah. Keberhasilan petani kaya kelas patron bertahan di posisi elit struktur kelas di pedesaan Sulawesi Selatan, adalah menciptakan ikatan patronase di level horizontal. Iskandar dan Asmira menguraikan strategi yang dilakukan adalah menggalang aliansi personal dengan sesama elit desa melalui kondisi tertentu, seperti: merger usaha, perkawinan politik dan organisasi. Perkawinan politik misalnya, ini merupakan penyatuan sebuah keluarga sukses (dengan menjodohkan anak atau anggota keluarga yang lain) dengan sesama keluarga sukses lainnya tanpa melihat derajat dan status sosial masing-masing.

Mukhlis dan AHIRUL HABIB PADILAH menyatakan Wawasan Nusantara berperan penting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman yang ada. Ketahanan nasional juga menjadi landasan kuat dalam menjaga konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agus Mauluddin menguraikan relasi *elite* politik dan masyarakat pemilih memiliki peran strategis bagi konstruksi politik-kuasa. Kalkulasi rasionalitas masyarakat pemilih pada hubungan dengan elite politiknya. Bartoven Vivit Nurdin dan Shela Febriyanti menyatakan kontestasi

politik dapat diartikan sebagai sebuah persaingan atau kompetisi dalam kegiatan politik yaitu kegiatan mencari dan mempertahankan ataupun menentang pelaksanaan jabatan. dalam tataran makro maka isu politik identitas masih sangat kuat berlaku karena masyarakat yang heterogen, meskipun etnik Lampung minoritas, namun secara identitas dan kuasa dalam politik lokal di Lampung masih sangat kuat, sedangkan dalam tataran mikro isu politik identitas tidak berlaku karena masyarakat yang relatif homogen. Muhammad Iqbal Latief, Rahmat Muhammad, Hariashari Rahim, dan Ridwan Syam menganalisis Pemilihan Umum tahun 2019 dengan implikasi sosiologis masalah KPPS dan kelembagaan KPU pada implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Hasil studi menggambarkan, UU No. 7 tahun 2017 justru menjadi masalah serius dalam kelembagaan KPU pada Pemilu 2019. Antara lain; (1) prinsip hirarkis dalam struktur KPU tidak berjalan efektif; (2) desain kelembagaan yang sentralistik; (3) Prinsip Pemilu yang efisien dan efektif tidak tercermin dalam penggunaan sumber daya, dan; (4) dari perspektif sosiologis, akuntabilitas KPU mengalami penurunan. Siti Irene Astuti Dwiningrum menguraikan proses untuk membangun budaya tanggap bencana sangat membutuhkan dukungan modal sosial. Oleh karena itu, penguatan modal sosial dalam masyarakat perlu dibangun dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang rawan bencana agar resilien. Sinergitas sosial dalam membangun masyarakat resiliensi membutuhkan pendekatan yang komprehensif Model Chen untuk dipertimbangkan implementasinya di Indonesia karena menekankan pentingnya untuk membangun dengan mitra potensial dengan proyek ICBDM (*Integrated Community-Based Disaster Management*).

Usman Raidar menjelaskan secara teoritis kecenderungan birokrasi sebagai kelompok kepentingan tersendiri tentu akan melahirkan pola pertikaian baik antara warga dengan warga maupun antara negara dengan warga yang sudah barang tentu akan melahirkan krisis kepercayaan yang menjadi tolak ukur keserasian hubungan negara warga, sehingga birokrasi terkesan menjadi mesin politik tak terkendali yang cenderung patologis dan menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Andreas Ambrosius Susanto menyatakan partisipasi politik merupakan aspek mendasar dari pengembangan masyarakat demokratis. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, masuknya semua kelompok etnik dan budaya dalam proses politik sangat penting untuk pembangunan dan stabilitas suatu bangsa. sejak Orde Baru, etnik Tionghoa telah menghadapi hambatan dan tantangan yang signifikan dalam partisipasi politiknya, termasuk diskriminasi, dan pengucilan dari proses dan lembaga politik. Stereotip negatif, politik identitas, dan kekerasan rasial merupakan hambatan dan tantangan pada pasca Reformasi. rekomendasi kebijakan dan program untuk mempromosikan inklusivitas dan keragaman dalam politik, perlindungan kelompok minoritas, yang dapat berdampak positif bukan hanya bagi etnik Tionghoa dan kelompok minoritas lainnya. Yeheskial A. Roen menguraikan dinamika identitas etno-religius pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menggunakan kerangka *logics of critical explanation*. Analisis data teks yang berkaitan dengan isu identitas dan Pilgub NTT pada koran Pos Kupang, Timor Ekspres dan Victory News. Temuan fenomena identitas dalam politik NTT, yakni logika sosial mengidentifikasi penanda-penanda apa saja yang disematkan pada diskursus identitas dalam Pilgub NTT, logika politik menjelaskan konstruksi dan kemunculan identitas etno-religius dalam Pilgub NTT, dan logika *fantasmatic* bagaimana diskursus identitas mencengkrum subyek pemilih dalam *sub-nalar beatific* dan *horrific* merupakan penjelasan logika *fantasmatic*.

A Burchanuddin, Sobirin, Abdul Karim, Udin B. Sore menguraikan berakhirnya sistem kerajaan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 memberi pengaruh terhadap sistem pemerintahan di Kabupaten Bone. Pergeseran dinamika politik lokal di Indonesia mengalami perubahan. Demokrasi modern membuka ruang bagi masyarakat umumnya untuk dapat menjadi kepala daerah. Meskipun demikian, kelompok aristokrat di Kabupaten Bone masih terlegitimasi daripada kelompok masyarakat lainnya dalam struktur sosial, dan bahkan sebagai pemimpin puncak dalam struktur politik atau struktur kekuasaan. relasi aktor dan

struktur budaya yang terjadi pada ruang interaksi politik masyarakat, dimana aktor politik dari kalangan aristokrat diuntungkan oleh internalisasi nilai kultural pada masyarakat Bone yang masih kuat. Ridhah Taqwa dan Sunyoto Usman menjelaskan elite yang berperan adalah elit birokrasi, kepala kampung, pensiunan TNI, serta elit agama. Elite birokrasi menggalang dukungan dari PNS dan keluarganya, sedangkan kepala kampung memanfaatkan keluarga dan kliennya. Elit militer, selain keluarga inti juga client. Interaksi elit politik kota dan elit lokal bersifat timbal balik, sedangkan elit lokal dan massa bersifat satu arah. Jadi, elit lokal sebagai opinion leader menjadi broker antar elit kota dan massa pola sosialisasi dan mobilisasi politik sangat tergantung pada kepentingan dan afiliasi politik elit. Pemanfaatan institusi agama untuk berelasi dengan massa, baik elit agama (Santri), politik-birokrasi dan militer pada umumnya melalui masjid sebagai pranata utama kehidupan ummat. perubahan struktur sosial masyarakat, khususnya polarisasi elit yang berimplikasi pada perubahan orientasi politik dan pilihan politik komunitas santri. Selanjutnya diperlukan Pendidikan politik (pemilih) yang lebih menguatkan pilihan rasional.

Wahyu Budi Nugroho menyatakan politik identitas dibangun oleh konsep identitas yang bersifat esensial. Richard Rorty menguraikan manusia ironis adalah manusia yang menolak imperatif kategoris, kosakata akhir, dan terbuka bagi setiap kemungkinan. Manusia ironis memiliki kemampuan berempati dengan memosisikan dirinya sebagai liyan dikarenakan prinsip ketidaksengajaan yang dimilikinya. Dalam konteks kontestasi politik tahun 2024, konsep manusia ironis dapat mereduksi isu politik identitas yang berpotensi muncul di tengah masyarakat. Strategi budaya yang bisa ditempuh untuk memperkenalkan pemikiran ini kepada khalayak luas dapat dilakukan melalui tulisan populer dan berbagai saluran budaya pop. Victoria Sundari Handoko dan Antonius Budisusila menguraikan media digital sangat efektif dalam menentukan elektabilitas capres dan sering menjadi sarana menjatuhkan lawan politik melalui wacana, narasi, dan hoaks. Strategi ini mampu membentuk kapital simbolik.

Bab II: Agama Dalam Hubungan Elite dan Masyarakat dalam Pembangunan

Sri Suwartiningsih menyatakan interaksi simbolik saat Lebaran dalam bentuk tindakan *sungkem*. Anak *sungkem* kepada orang tuanya, yang kedudukan dalam silsilah keluarga lebih muda *sungkem* kepada yang lebih tua, yang status sosial dalam masyarakat lebih rendah kepada yang lebih tinggi (elite), yang ekonomi lebih rendah kepada lebih tinggi, namun ada yang ekonominya lebih tinggi tetapi karena secara silsilah keluarga lebih rendah maka dia juga *sungkem*. Hery Prasetyo, Dien Vidia Rosa, dan Rosnida Sari menyatakan masyarakat adat masih menghadapi marginalisasi yang membentuk formasi sosial bagi penyusunan taktik dalam menghadapi kelompok dominan. Masyarakat adat telah menciptakan habitus yang membuat mereka dapat mereproduksi politik identitas melalui ritualitas agama.

Bab III: Gender, Kesetaraan Berpolitik dan Kepentingan Publik

Aldi Ladunni Mahajaya, Luluk Dwi Kumalasari, dan Awan Setia Dharmawan menyatakan fenomena merokok elektrik di kalangan remaja putri merupakan salah satu fenomena yang muncul akibat rasa penasaran dan rasa ingin mencoba karena melihat teman-temannya yang juga menggunakan agar tidak ketinggalan zaman. Dien Vidia Rosa dan Hery Prasetyo menguraikan posisi perempuan adat memiliki kontribusi signifikan dalam penyelenggaraan ritual, tradisi serta tata kelola masyarakat adat. Perempuan-perempuan dengan posisi strategis dalam masyarakat adat Tengger menjadi titik penting rantai informasi apapun yang menyangkut kehidupan beradat. Relasi mereka dengan perempuan adat non elit atau yang diluar mereka adalah upaya untuk menjalin kekuatan dan mengamankan ruang artikulasi identitas kultural. Legitimasi maupun rekognisi adalah perjuangan perempuan adat untuk

menyuarakan kepentingan perempuan dan masyarakat yang dalam penelitian ini dilakukan oleh quasi elit perempuan adat dengan cara menegaskan akses atas ruang kultural.

Hadriana Marhaeni Munthe, Harmona Daulay, Ria Manurung, dan Rizabuana Ismail menyatakan ragam upaya tindakan rasionalitas inang-inang di ranah publik maupun ranah domestik guna mengamankan keberlangsungan hidup keluarga. Melakukan pinjaman modal usaha menjadi salah satu pilihan rasional. Mita Rosaliza, Hesti Asriwandari, dan Achmad Hidir menyatakan kerentanan membutuhkan adaptasi, hal ini terjadi karena sumber mata pencaharian yang ada tidak memadai. Studi pada perempuan Akit yang mewakili masyarakat yang rentan di wilayah pesisir terkait pengetahuan lokal terhadap kerentanan dan adaptasi perubahan iklim. Musrayani Usman, Nuvida RAF, Rahmat Muhammad, Muhammad Andi Arif, Mario, dan Saidang menyatakan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di bawah koordinasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan upaya preventif dalam ketahanan keluarga. Pemberdayaan berbasis gender dalam konteks ketahanan keluarga dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan program-program pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yuyun Sunesti menemukan inklusi sosial sebagai usaha dalam memastikan bahwa semua warga, baik anak-anak dan orang dewasa, turut berpartisipasi sebagai pihak yang dihargai, dihormati dan anggota masyarakat yang berkontribusi. kelompok rentan yaitu perempuan kepala keluarga (Pekka) di Nusa Tenggara Barat, merupakan kelompok rentan ganda karena statusnya yang mayoritas perempuan miskin sekaligus sebagai kepala keluarga pencari nafkah keluarga.

Bab IV: Kekuasaan, Pembangunan dan Krisis Lingkungan; serta (5) Masyarakat, Adat dan Perhutanan Sosial

Joharotul Jamila dan Hima Hafiya Fitri menguraikan proses eksklusi sosial akibat pembangunan pariwisata Tanjung Lesung melalui 4 mekanisme yaitu force (pemaksaan jual-beli lahan), market (penjualan tanah melalui mekanisme pasar), regulasi peraturan penetapan perluasan lahan pariwisata), dan legitimasi (pengakuan/klaim lahan hak milik perusahaan). Yusmar Yusuf dan Syamsul Bahri menjelaskan ketidakseragaman tentang konseptualisasi program CSR di berbagai negara di dunia, telah menimbulkan kecenderungan yang berbeda pula dalam proses pelaksanaan CSR di masyarakat. Program CSR di Indonesia terbukti benar berjalan malpraktek dan berdampak buruk bagi keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Addin Kurnia Putri: Gerakan lingkungan menjadi salah satu bagian dari strategi agensi dalam demokrasi atas kontestasi politik ruang. Intermodalitas yang menciptakan ruang hybrid. Itu adalah ruang komunikasi yang memungkinkan gerakan terbentuk dan terhubung dengan masyarakat luas melalui kekuatan teknologi informasi di luar kendali instansi pemerintah. Aktivisme digital menggunakan aktivitas kolaboratif dalam media digital yang terhubung sebagai simpul dalam jaringan ruang kota.

Argyo Demartoto menguraikan inovasi dan transformasi digital pariwisata membuka peluang bagi berbagai pihak baik pemerintah, swasta, pelaku wisata dan masyarakat. Collaborative governance menjadi solusi pengembangan pariwisata berbasis digital, karena pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana serta layanan wisata membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ashaluddin Jalil, Yesi, Swis Tantoro, dan Syafrizal menjelaskan pertanian lahan tanpa bakar (PLTB) digencarkan untuk mendukung pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. strategi yang dapat diterapkan dalam pembiasaan penerapan metode pembukaan lahan tanpa bakar. Pertama, penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan dan akses modal terutama dari BUMDes. Haslinda B. Anriani, Asmirah, Harifuddin, dan Rasyidah Zainuddin menguraikan efek kekuasaan pada terjadinya krisis lingkungan di Kabupaten Pangkep adalah berkontribusi secara tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan berupa pengawasan pelaksanaan pembangunan yang tidak maksimal;

pembangunan menimbulkan bencana banjir di Kabupaten Pangkep melalui alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan perumahan, alih fungsi lahan pertanian menjadi empang, terjadinya pendangkalan sungai akibat arus hujan yang membawa material tambang. Ikma Citra Ranteallo menguraikan pendekatan transdisipliner untuk memperluas penelitian sosiologis, termasuk pertanian padi dan peradaban manusia. Sosiolog menggunakan berbagai foto dan video, juga teks sebagai data digital yang berkaitan dengan pertanian. Metode transdisiplin memungkinkan para ilmuwan dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam ilmu komputer, desain, politik, geografi perkotaan, dan disiplin ilmu lainnya. Teknologi komunikasi dan informasi digital saat ini mempengaruhi bagaimana konservasi dilakukan untuk mencapai kehidupan yang berkelanjutan.

Meila Riskia Fitri menguraikan strategi pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat Baduy, melalui bercocok tanam padi di huma atau ladang miliknya. Proses pengendalian hama yang diterapkan dengan menggunakan ritual adat merupakan pengendalian alami untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem pertanian. Nilai-nilai luhur yang sejalan dengan *tujuan Sustainable Development Goals* terwujud pada pengaturan waktu dan pola tanam yang dilakukan saat bercocok tanam. Sakaria To Anwar, Muhammad Sabiq, dan Arisnawawi menyatakan Desa Kahayya sebagai salah satu kawasan pengembangan wisata alam di Kabupaten Bulukumba, yang tidak terlepas dari ancaman kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Mitigasi bencana dari pengembangan wisata sudah saatnya menjadi perhatian besar, seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa Kahayya dalam pengembangan wisatanya. Siti Arieta dan Teguh Setiandika Igiasi menjelaskan penangkapan ikan berlebih yang melibatkan penggunaan sianida telah menjadi penyebab utama degradasi ekosistem pesisir laut, sekaligus mengancam keberlanjutan mata pencaharian utama nelayan. Kekerasan simbolik yang terjadi pada sebuah arena merupakan hasil kompetisi habitus dan modal yang dimiliki dalam dikotomi kelas dalam masyarakat. *Structured structure* merupakan gambaran dari keberhasilan pihak dominan dalam jaringan perikanan yakni tauke untuk mempengaruhi nelayan agar menggunakan sianida dalam setiap aktivitas penangkapan.

Cynthia Ayu Windani, Julia Rezeki, Aulia Dwi Adhitya, dan Syarifah Dwi Pratama menyatakan dampak sosial yang timbul akibat aktivitas eksploitasi tambang dan transpor material di kawasan Cigudeg dan Rumpin, berdasarkan pendekatan *green victimology* dalam kajian kejahatan lingkungan. Aktivitas tambang jangka panjang merupakan bentuk kejahatan lingkungan, di mana kondisinya sudah lagi tidak *victimless* karena secara nyata ada korban dari aktivitas tersebut. Solusi utama untuk mengurangi kerusakan infrastruktur, kecelakaan, dan ISPA memang harus melakukan pemisahan jalur dengan jalur publik. Ria Renita Abbas, Nuvida R.A.F, Nurlela, Shinta Mutiara Rezeky, dan Tamra menyatakan konteks lahan memiliki persepsi dan hubungan yang berbeda antara petani sebagai masyarakat bawah dan korporasi sebagai elit ekonomi. Keterlibatan aktor dalam kontestasi penguasaan lahan tiga desa di Telukjambe Barat memperlihatkan adanya pertarungan kepentingan akan lahan dari dua kekuatan aktor utama yaitu pemerintah yang berkolaborasi dengan korporasi untuk kepentingan pembangunan ekonomi melalui pengembangan kawasan industri, dan kelompok petani yang memiliki kepentingan akan tanah sebagai penghidupan dan tanah sebagai warisan.

Idham Irwansyah, Sopian Tamrin, dan Riska Damayant menjelaskan mekanisme kuasa punggawa pada sawi dalam masyarakat nelayan di Bajoe, Kabupaten Bone. Ketergantungan dalam hubungan punggawa-sawi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kekerabatan dan faktor ekonomi. Kekerabatan adalah suatu jaringan aktif menjembatani hubungan kerja nelayan. Punggawa membutuhkan tenaga kerja dan sawi membutuhkan pekerjaan. Pemenuhan kebutuhan pokok dan hal mendesak lainnya membuat sawi harus melakukan permintaan bantuan kepada punggawa. Muryanti menyatakan pemberdayaan petani merupakan bagian dari revitalisasi pembangunan pertanian. Prosesnya dapat dilakukan secara multidimensi dengan melibatkan pemerintah, stakeholder, swasta dan partisipasi petani secara aktif melalui

organisasi petani. Ketiga aktor tersebut memiliki peran masing-masing yang saling mendukung. Pemberdayaan untuk petani muda dilakukan secara lebih inovatif yang mampu menariknya bekerja pertanian. Prapti Murwani, Tonny D. Pariela, dan Simona Ch. Litaay menyatakan *kewang* adalah salah satu lembaga adat yang memiliki tugas dan peran dalam mengelola lingkungan di Kota Ambon. Perspektif *Indigineouse* memandang bahwa potensi lokal merupakan faktor yang dapat menggerakkan kekuatan pembangunan. *kewang* memiliki kemampuan dalam menggerakkan masyarakat secara partisipatif, juga mengakomodir semua perwakilan dari masyarakat.

Rosnida Sari, Nita Purnamasari, Hery Prasetyo, dan Dien Vidia Rosa menjelaskan krisis air salah satunya juga terjadi di wilayah kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Dukuh Dungus. Bentuk interaksi disosiatif tersebut terjadi karena minimnya air bersih yang diperoleh dari PDAM sehingga terjadi persaingan dan pertikaian. Sedangkan bentuk asosiatif terjadi ketika kondisi air mencukupi maka masyarakat saling membantu dengan cara menyumbangkan air yang dipunya. perempuan. Pembagian peran gender membuat mereka harus bertanggung jawab atas kebutuhan air keluarganya. Ketika kekeringan terjadi, mereka harus mencari air sampai harus berjalan sejauh 3-4 kilometer untuk mendapatkan sumber air. Situasi ini tentu rentan bagi mereka apalagi jika mereka dalam keadaan hamil atau harus menggendong anak yang masih kecil atau membawa anak mereka untuk berjalan sejauh itu. Sopian Tamrin, Idham Irwansyah, dan Najamuddin menyatakan masyarakat nelayan di Kelurahan Sapolohe, Tanah Beru dan Tanah Lemo menjadikan laut sebagai sumber kehidupan. Kesadaran ekologi masyarakat nelayan dapat bisa dilihat dari dua aspek. Kesadaran yang dibentuk oleh kultur bersumber dari sistem kepercayaan lokal yang diwariskan oleh leluhur mereka. Kesadaran yang dibentuk oleh struktur bersumber dari pemerintah dan institusi otoritas kelautan seperti pol air. Yesi, Hesti Asriwandari, Yoskar Kadarisman, dan T. Romi Marnelly menguraikan kriteria kelompok rentan meliputi masyarakat adat, petani gurem, perempuan, dan masyarakat miskin di Provinsi Riau. Tanah Soko adalah tanah yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang ke perempuan, yang tidak boleh diperjualbelikan. Potensi konflik yang muncul dari pengaturan kepemilikan dan penguasaan tanah bersumber dari adanya aturan adat yang dilanggar baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh masyarakat secara umum atau bagian dari struktur adat seperti menjual tanah Pisoko, tanah Soko maupun tanah ulayat secara illegal. Sugiyanto dan Lintang Brillian Pintakami menyatakan krisis lingkungan tidak hanya menyebabkan kerusakan pada sumberdaya alam, namun juga krisis lainnya yang serius yaitu ketakberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan pada tingkat rumah tangga dan individu. polusi udara, periode kekeringan, dan naiknya permukaan laut berdampak signifikan terhadap ketersediaan dan nilai jual komoditas pangan di Jawa Timur.

Bab V: Masyarakat, Adat Dan Perhutanan Sosial

Elly Esra Kudubun menjelaskan Tom Tad sebagai sejarah lisan yang mengatur pembagian masyarakat Kei, Maluku Tenggara, yaitu *mel-mel* (bangsawan?), *ren-ren* (penduduk asli?) dan *iri-ri* (pembantu). Dalam tatanan sosial masyarakat Kei, perbedaan bukan untuk memecah-belah, namun perbedaan itu justru menjadi esensi dalam struktur sosial orang Kei, untuk menjaga keseimbangan dan menyatakan identitas. Penerimaan pada *lyan* itulah esensi paling dasar dari *Ain ni Ain* yang dilegitimasi lewat proses eksternalisasi. Imam Fachruddin, Teguh Pramono, Muhammad Lukman Hakim, Edy Supriyanto, dan Daimul Abror menyatakan Lembaga Adat Desa (LAD) di Kabupaten Pasuruan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat lokal. Optimalisasi fungsi dan tugas LAD perlu dilakukan mengingat dari Fungsi dan Tugas Pokok LAD yang tercantum pada Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2020, dimana ada beberapa hal yang belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada poin Fungsi dan Tugas LAD dalam

melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa.

Indraddin, Dwiyantri Hanandini, dan Retno Anggraini menyatakan urgensi pendaftaran tanah untuk pertama kali pada tanah yang belum bersertifikat dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi pemilik tanah. penatausahaan tanah ulayat dibutuhkan prosedur yang berbeda dengan penataan tanah pribadi. Walaupun prosedur hukum pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional sama antara tanah milik pribadi dan milik kaum, namun dalam proses penatausahaannya mulai dari pendaftaran atau pensertifikatan tanah tidak bisa mengikuti prosedur biasa, karena pemilik dari tanah ulayat bukanlah perorangan, sehingga dalam penatausahaan perlu melibatkan berbagai pihak. Pensertifikatan tanah ulayat perlu melibatkan berbagai unsur didalam masyarakat dalam ketentuan adat. Pieter Jacob Pelupessy menjelaskan masyarakat adat di Kabupaten Buru, memiliki berbagai kelembagaan *soa* dalam melayani berbagai kepentingan masyarakat. masyarakat adat yang mendiami desa adat membutuhkan regulasi atau perundang-undangan yang mengatur tentang desa adat sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Tentang Desa. Melalui perundang-undang masyarakat adat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik terhadap lingkungan sosial, termasuk juga dalam pengelolaan hutan sosial atau hutan kemasyarakatan yang sesuai dengan adat-istiadat setempat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Royke Roberth Siahainenia, Rizki Amalia Yanuartha, dan Putri Hergianasari menyatakan upaya penetapan ruang adat dan budaya masyarakat Adat Dayak di kawasan pembangunan nasional ibukota negara baru. Ruang Adat Dayak memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan masyarakat Adat Dayak, karena di dalamnya terdapat sistem pengetahuan, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. pembangunan ibukota baru Indonesia, sehingga dapat menghindari konflik sosial dan dapat mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Mohamad Shohibuddin, Eko Cahyono, Habiburrahman, Fajar Ahsani, Gayatri Kusumastuti menjelaskan devolusi merupakan kebijakan tata kelola sumber daya alam yang dianggap paling tepat, terutama ketika suatu sumber daya alam memiliki ciri “sumber daya bersama”. Karakteristik identitas adat (*indigeneity*) komunitas Natarmage di Kabupaten Sikkapelaksanaan devolusi sumber daya alam sebagai sebuah proses yang tidak netral, sebaliknya sangat dikontestasikan dan bersifat politis. *sociology of ignorance* yang mengandung dua pengertian yang dapat terjadi. narasi etnogeni, sejarah keterikatan pada wilayah ulayat, keunikan sistem tata ruang tradisional dan praktik khas pengelolaan sumber daya alam pada komunitas ini. Pertama adalah “bias pandangan elite” yang menyebabkan keengganan pihak elite untuk memandang realitas sebenarnya. Kedua, “distorsi atas realitas” oleh pihak elite yang menyebabkan kebenaran menjadi wilayah gelap yang tidak dikenal dan tidak terpikirkan (*unthinkable*) dalam kesadaran kolektif masyarakat luas. Sopar, Riki Yulianda, dan Arfriani Maifizar menyatakan fungsi panglima laot bagi msyarakat nelayan pesisir di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Panglima Laot berfungsi mengkoordinir penangkapan ikan, mengatur izin penggunaan alat tangkap ikan dan menjaga ekosistem laut agar tetap terjaga kelestariannya sebagai sumber kehidupan nelayan. memberi sanksi-sanksi terhadap nelayan lokal atau nelayan pendatang yang melanggar larangan *adat melaot*.

Sulistya Wardaya dan Anni Suprpti menjelaskan resiprositas dalam masyarakat transmigran merupakan bentukan baru sekumpulan orang-orang dari suku yang berbeda yang didatangkan oleh pemerintah. Studi pada transmigran yang tinggal di tepian hutan lindung Boven Lais Register 41, Bengkulu Utara, dikenal dengan kawasan habitat bunga *Rafflesia Gadutensis*. Resiprositas kelangsungan hidup, musibah, resiko ekonomi dan masalah bersama, bentuk jaminan sosial masyarakat kepada anggotanya dalam menghadapi masalah yang tidak mampu ditanggung secara individu. Sulistyaningsih menyatakan Kabupaten Gunungkidul

merupakan salah satu kabupaten yang terkenal kesuksesannya dalam mengembangkan hutan rakyat. hutan rakyat sebagai sebuah aktivitas kehutanan yang melibatkan rakyat. Bentuk pengetahuan lokal yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Gunungkidul melalui model *agroforestry* (cara menanam tanaman palawija yang berdampingan dengan tanaman kehutanan), memperhatikan kalender musim atau *pranoto mongso* dalam mengolah lahan pertanian dan kehutanan serta adanya filosofi menebang satu pohon harus menanam sepuluh pohon. Sumarto Widiono, Nurhayati Darubekti, dan Sri Handayani Hanum menguraikan penuaan penduduk (*ageing population*) sebagai fenomena global. Kualitas hidup adalah konsep multidimensi yang berkaitan dengan domain fisik dan psikologis yang luas, tingkat sosial serta aspek kualitas hidup tertentu: perasaan positif, dukungan sosial, dan sumber daya keuangan. lansia pedesaan yang memiliki aktivitas hidup sehari-hari yang lebih baik maka memiliki kualitas hidup yang lebih baik secara signifikan di semua domain. Quality of Life (QoL) lansia memang rendah dalam domain kesehatan fisik, akan tetapi QoL psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan adalah baik. Kepuasan mereka secara keseluruhan cukup baik. Ditemukan hubungan antara lingkungan pedesaan yang kondusif dengan kepuasan hidup lansia serta QoL dalam domain psikologis.

Denpasar, 16 Agustus 2023

REFERENSI

- Hammersley, Martyn. 2023. *Karl Mannheim on Fascism: Sociological Lessons About Populism and Democracy Today?*. (Sociological Research Online, Vol. 28, No.2).
- Hellmeier, Sebastian, dan Michael Bernhard. 2023. *Regime Transformation From Below: Mobilization for Democracy and Autocracy From 1900 to 2021*. (Comparative Political Studies, Vol. 0, No. 0).
- Higley, John dan Michael G. Burton. 1989. *The Elite Variable in Democratic Transitions and Breakdown*. (American Sociological Review, Vol. 4, No. 1)
- Higley, John. 2008. *Elite Theory in Political Sociology*, IPSA Montreal 2008, MTL1-Political Sociology. Diakses pada 4 Mei 2023 di http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_4036.pdf.
- Passos, Eduardo Schmidt. 2023. *Political Thought and Race Ideas in Brazil: Oliveira Vianna and Gilberto Freyre*. (Comparative Political Theory, Vol. 3, No. 1).
- Schmidt-Catran, Alexander W., dan Christian S. Czymara. 2023. *Political Elite Discourses Polarize Attitudes Toward Immigration Along Ideological Lines. A Comparative Longitudinal Analysis of Europe in the Twenty-First Century*. (Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 49, No. 1).